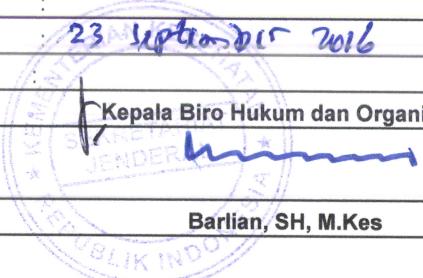




KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP : OT. 02.01/4/4694/2016
Tgl. Pembuatan : 22 September 2016
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : 23 September 2016
Disahkan oleh
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Barlian, SH, M.Kes
Nama SOP : Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perpu Inisiatif Pemerintah

Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Cover	1. Memahami Ilmu Hukum secara keseluruhan terutama Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tentang penyusunan perancangan perundang-undangan (Suncang) 3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1 SOP Disposisi Pimpinan 2 SOP Penyiapan Bahan Telaahan 3 SOP Penyelenggaraan rapat	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 2. Hasil kajian atau naskah akademis yang terkait 3. Buku-buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum yang terkait 4. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia terbaru 5. ATK dan peralatan kantor

Peringatan : Apabila penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara	Pencatatan dan Pendataan : Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dicatat dalam buku registrasi peraturan
---	--

Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perpu Inisiatif Pemerintah

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	Caraka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan Kepala Bagian PP untuk menindaklanjuti proses harmonisasi RUU/R.PERPU kepada Kementerian Hukum dan HAM							bahan RUU	5 menit	Catatan arahan	
2	Memberikan instruksi Kasubag PP untuk membuat surat pengantar harmonisasi RUU/R.PERPU kepada Kementerian Hukum dan HAM							Catatan arahan	10 menit	Catatan instruksi	
3	Menugaskan Perancang PUU untuk membuat surat pengantar dan verbal harmonisasi RUU/R.PERPU kepada Kementerian Hukum dan HAM							Catatan instruksi	10 menit	Catatan penugasan	
4	Membuat surat pengantar dan verbal harmonisasi RUU/R.PERPU kepada Kementerian Hukum dan HAM							Catatan penugasan	60 menit	Konsep surat pengantar harmonisasi, Verbal	
5	Mengoreksi konsep surat pengantar harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM							Konsep surat pengantar harmonisasi, Verbal	10 menit	Konsep surat pengantar harmonisasi, Verbal	
6	Menyempurnakan konsep surat pengantar harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM							Konsep surat pengantar harmonisasi, Verbal	5 menit	Konsep surat pengantar harmonisasi, Verbal	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Perancang PUU	Arsiparis	Caraka	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Y	T								
18	Menyetujui dan menetapkan surat pengantar RUU/R.PERPU kirim Presiden kepada Kementerian Sekretariat Negara dan mengarahkan kabag PP untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							Konsep surat	5 menit	Surat permohonan persetujuan Presiden	
19	Menugaskan Kasubag PP untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							Surat permohonan persetujuan Presiden	10 menit	surat permohonan persetujuan Presiden	
20	Menginstrusikan perancang PUU, Arsiparis, dan Caraka untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							Surat permohonan persetujuan Presiden	10 menit	Surat permohonan persetujuan Presiden	
21	Melaksanakan proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden							surat permohonan persetujuan Presiden	30 menit	surat permohonan persetujuan Presiden	
22	Melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kodifikasi UU/PERPU yang telah disahkan							surat permohonan persetujuan Presiden	10 menit	Dokumentasi	